

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reputasi perusahaan saat ini tidak lagi semata-mata dihasilkan oleh *good market performance*, melainkan juga *good corporate social responsibility* (CSR). Perusahaan yang melaksanakan CSRnya dengan baik akan mendapatkan keunggulan kompetitif karena inovasi, cara berpikir jangka panjang, hubungan yang strategis dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan), keterbukaan serta penciptaan sebuah organisasi belajar. Menurut Rusliaman *et.al* **“tanggung jawab sosial merupakan suatu pengakuan bahwa dunia bisnis harus memikirkan dimensi-dimensi kualitatif dari pelanggan, karyawan, dan manfaat sosial sekaligus pada ukuran kuantitatif dari penjualan dan laba.”**¹

Dalam hal ini perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tapi tanggungjawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan.

CSR menjadi tren global seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-

¹ Rusliaman Siahaan *et al*, **Pengantar Bisnis**, Edisi kedua: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2016, hal.37

prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dilandasi pemikiran yang dianggap hal utama dari etika bisnis adalah perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (kepada pemegang saham atau *shareholder*) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap *stakeholder*, lebih dari itu perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial dengan semua *stakeholder*, termasuk di dalamnya adalah pelanggan atau *customer*, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, *supplier* bahkan juga kompetitor. Owen dalam Kania menyatakan Perkembangan CSR dipicu sedikitnya oleh 5 hal :

- a. Maraknya fenomena "take over" antar korporasi yang kerap dipicu oleh keterampilan rekayasa finansial.
- b. Runtuhnya tembok Berlin yang merupakan simbol tumbangya paham komunis dan semakin kokohnya imperium kapitalisme secara global.
- c. Meluasnya operasi perusahaan multinasional di negara-negara berkembang, sehingga dituntut supaya memperhatikan: HAM, kondisi sosial dan perlakuan yang adil terhadap buruh.
- d. Globalisasi dan menciutnya peran sektor publik (pemerintah) hampir di seluruh dunia telah menyebabkan tumbuhnya LSM (termasuk asosiasi profesi) yang memusatkan perhatian mulai dari isu kemiskinan sampai pada kekuatiran akan punahnya berbagai spesies baik hewan maupun tumbuhan sehingga ekosistem semakin labil.

- e. Adanya kesadaran dari perusahaan akan arti penting merk dan reputasi perusahaan dalam membawa perusahaan menuju bisnis berkelanjutan.”²

Di Indonesia, kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan tersebut diatur oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 tahun 2007, dimana perusahaan yang melakukan kegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada pimpinan puncak perusahaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar perusahaan di Indonesia memiliki struktur kepemilikan individu atau keluarga sehingga kebijakan yang diambil perusahaan cenderung akan mengikuti kehendak *shareholders* terbesar di perusahaan. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi perusahaan. Jika pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral yang tinggi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang benar. Sebaliknya jika orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan kepuasan *shareholders* maka kebijakan CSR hanya sekedar untuk menjaga nama perusahaan.

Secara umum di Indonesia, pelaporan CSR telah terakomodasi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Tahun 2013 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Berdasarkan PSAK No.1 Tahun 2013 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 12 dinyatakan bahwa:

² Kania Amanda Distha, Skripsi **Pengaruh Praktek *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Perbankan yang Terdaftar Di bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2007-2009**: Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011, hal. 3

”Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Dari pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tersebut dapat diartikan bahwa perusahaan disarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial. Peraturan lain yang mengatur mengenai kewajiban pengungkapan CSR juga diatur didalam undang-undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 pasal 15 bagian (b), pasal 17, dan pasal 34 yang mengatur bahwa setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial.

Diduga banyak konflik sosial terjadi karena tidak diimplementasikan CSR dengan baik oleh perusahaan, terutama tindakan kurang peduli terhadap *stakeholder* sekunder, yaitu masyarakat sekitar. Ada beberapa masalah sosial yang terlibat atau terkait perusahaan industri karena masalah sosial dengan kepentingan berbagai pihak yang saling berhubungan atau berkaitan, masalah sosial yang saat ini menjadi sorotan berbagai pihak adalah munculnya isu tanggung jawab sosial dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, beberapa perusahaan lokal yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan sempat menjadi *Headline* di berita nasional seperti PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, P.T Freeport di Irian Jaya, dan Newmont Minahasa Raya di Buyat, Sulawesi, beberapa tahun

silam. Kejadian-kejadian ini telah membuka mata orang-orang Indonesia tentang betapa pentingnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut. Bahkan sampai sekarang dampaknya masih dirasakan masyarakat sekitar. Di Indonesia sebagai negara yang terdiri dari perpaduan berbagai kebudayaan dan lingkungan, pemerintah sangat menyadari pentingnya untuk menjaga lingkungan tersebut khususnya untuk perusahaan yang kegiatannya sangat berkaitan erat dengan lingkungan.

Implementasi program CSR oleh perusahaan pada hakikatnya bersifat orientasi dari dalam ke luar. Hal tersebut berarti sebelum melaksanakan aktifitas CSR yang bersifat *voluntary*, perusahaan terlebih dahulu harus membenahi kepatuhan perusahaan terhadap hukum. Perusahaan pun harus menjalankan bisnisnya dengan baik sehingga dapat menjamin tercapainya maksimalisasi laba (*economic responsibilities*). Selain itu, perusahaan perlu mengembangkan sejumlah kebijakan untuk menentukan pelaksanaan CSR. Semua hal tersebut tidak akan terlaksana dengan baik bila perusahaan tidak menerapkan *corporate governance* yang baik (GCG). Menurut Muindro **“Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan publik.”**³

Dengan adanya mekanisme dan struktur *governance* diperusahaan maka akan dapat mengurangi asimetri informasi. Apabila asimetri informasi dibiarkan terjadi, maka dapat menyebabkan terjadinya *moral hazard*, dengan konsekuensi perusahaan tidak melaksanakan praktik dan pengungkapan CSR. Pernyataan ini didukung oleh Monks dimana menurut Monks dalam Waryanto **“mekanisme**

³ Muindro Renyowijoyo, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Ketiga: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hal. 11

Good Corporate Governance (GCG) akan bermanfaat dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholders.⁴

Adanya hubungan yang saling berkaitan antara *corporate social responsibility (CSR)* dengan *good corporate governance (GCG)* dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwisastrawan dan Agung menyatakan ***“good corporate governance berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.”***⁵. Untuk mendukung agar GCG dapat mengendalikan dan mengatur perusahaan dengan baik maka diperlukan organ perusahaan yang harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Organ perusahaan tersebut terdiri dari dewan komisaris dan pemegang saham.

Kepemilikan saham manajerial merupakan salah satu bentuk struktur kepemilikan yang dapat mengatasi masalah agensi yang menyebabkan terjadinya konsep GCG. Jensen & Meckling (1976) dalam Waryanto (2010) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen akan menurunkan permasalahan agensi dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen, maka manajemen akan ikut serta aktif dalam

⁴ Waryanto, Skripsi ***Pengaruh Karakteristi Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia:*** Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 3

⁵ Dwisastrawan dan Agung, ***Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial,*** Jurnal Akuntansi, Vol. 14. No. 1:371-398, 2016

pengambilan keputusan. Mereka akan memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya, namun juga akan menanggung risiko secara langsung bila keputusan itu salah. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan yaitu dengan cara mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan yang akan menjadikan perusahaan unggul secara kompetitif. Dengan demikian, manajemen tidak akan bertindak secara sepihak yang akan merugikan perusahaan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramdhaningsih dan Utama (2013) kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan.

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan kepada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Komisaris independen diharapkan bisa mengawasi tindakan yang dilakukan oleh manajemen dengan lebih baik, mengingat bahwa Komisaris Independen berasal bukan dari golongan terafiliasi. Dengan demikian, semakin besar komposisi dewan komisaris independen, maka kemampuan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh pemangku kepentingan dan mengutamakan perusahaan semakin objektif. Dengan demikian hal ini akan mendorong pengungkapan CSR secara lebih luas karena salah satu informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan adalah tanggung jawab sosial. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulis Rochayatun (2017) bahwa dewan komisaris independen berpengaruh

signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan.

Struktur kepemilikan saham yang lain yaitu kepemilikan saham terkonsentrasi. Menurut Nuryaman dalam Waryanto: **“konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen, sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring, karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen.”**⁶

Dalam hal ini, kepemilikan mayoritas atau terkonsentrasi dapat mengurangi masalah agensi dan melakukan proses monitoring dengan baik. Dengan kepemilikan saham yang terkonsentrasi, maka pemegang saham dapat mengimbangi informasi yang dimiliki manajer, dengan kata lain proses monitoring dari pihak pemegang saham terhadap manajemen dapat berjalan dengan baik dan tindakan oportunitis manajemen untuk menyembunyikan informasi akan berkurang. Dengan demikian dapat mendorong pengungkapan CSR untuk dilakukan lebih luas. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Waryanto (2010) dimana kepemilikan saham terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan.

Pemilihan pada perusahaan manufaktur sektor industri ini didasarkan pada alasan bahwa industri manufaktur merupakan kelompok emiten yang terbesar dibandingkan sektor yang lain, sehingga dengan asumsi semakin besar objek yang

⁶ Waryanto, **Op.Cit**, hal. 24

diamati maka akan semakin akurat hasil penelitian . Sektor manufaktur dipilih juga karena sektor tersebut memiliki tingkat kompetisi yang kuat.

Penelitian ini mencoba melihat bagaimana karakteristik GCG berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)* pada perusahaan manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Kania Amanda Distha (2011) meneliti mengenai pengaruh praktek *good corporate governance (GCG)* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Alasan saya menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Kania sebagai acuan adalah karena adanya *research gap* dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Kania menyatakan bahwa struktur kepemilikan tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, sementara pada penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Yulia dan Melvie (2011) dan Lisanti (2015) menyatakan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Adanya hasil yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian sebelumnya menyebabkan isu ini menjadi topik yang penting untuk diteliti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Kania Amanda Distha (2011) adalah sama-sama meneliti mengenai pengaruh praktek *good corporate governance (GCG)* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Kania Amanda Distha (2011), antara lain: 1) Sampel yang digunakan oleh sebelumnya adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur sektor

industri dasar dan kimia, 2) Periode penelitian yang digunakan oleh sebelumnya adalah tahun 2007-2009, sedangkan dalam penelitian ini periode yang digunakan adalah tahun 2016-2018, 3) Variabel independen yang digunakan oleh sebelumnya adalah struktur kepemilikan terkonsentrasi, komposisi dewan komisaris dan ukuran dewan komisaris independen, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu kepemilikan saham manajerial, ukuran dewan komisaris independen dan kepemilikan saham terkonsentrasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul **“Pengaruh Praktek *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari Latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan saham manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan?
2. Apakah ukuran dewan komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan?
3. Apakah kepemilikan saham terkonsentrasi berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan.

4. Apakah kepemilikan saham manajerial, ukuran dewan komisaris, kepemilikan saham terkonsentrasi berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan CSR perusahaan.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi karena keterbatasan waktu dan pengalaman peneliti. Pada penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada perusahaan manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia untuk periode tahun 2016-2018. Selain itu peneliti juga membatasi karakteristik pengujian yang dilakukan, yaitu Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris dan Kepemilikan saham terkonsentrasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Saham Manajerial terhadap pengungkapan CSR perusahaan
2. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan CSR perusahaan.
3. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Saham Terkonsentrasi terhadap pengungkapan CSR perusahaan.
4. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan saham manajerial, ukuran dewan komisaris, kepemilikan saham terkonsentrasi berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan ekonomi khususnya tentang pengaruh GCG terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Selain itu penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti lain sebagai bahan referensi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

- a. Bagi peneliti, dapat memperluas pengetahuan di bidang akuntansi keuangan khususnya mengenai pengungkapan CSR.
- b. Bagi universitas, dapat menambah bahan referensi dan informasi bacaan khususnya yang akan menyusun skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Dalam rangka memahami konsep *Good Corporate Governance (GCG)*, maka digunakanlah dasar perspektif hubungan keagenan. Teori keagenan menjelaskan dan memprediksi perilaku dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan. Menurut Adanan Silaban **“hubungan keagenan dapat digunakan untuk memahami perilaku organisasional dengan menguji bagaimana pihak-pihak yang memiliki hubungan keagenan dalam suatu perusahaan memaksimalkan kesejahteraan mereka.”**⁷

Salah satu bentuk keagenan yang utama adalah hubungan antara manajemen dengan pemilik perusahaan. Manajemen dipekerjakan dan digajin oleh pemilik untuk menjalankan bisnis, dan dengan demikian membentuk suatu hubungan keagenan. Eisenhardt dikutip dalam Isnanta menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu:

- a. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*),**
- b. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*)**
- c. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia kemungkinan**

⁷ Adanan Silaban, **Teori Akuntansi**: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2019, hal 41.

besar akan bertindak berdasarkan sifat oppotunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.⁸

Tujuan manajer dan pemilik dapat terjadi dalam suatu persetujuan yang tidak sempurna karena kepentingan yang berbeda. Dalam hubungan keagenan ini dapat terjadi konflik atau pertentangan kepentingan *principal* dan *agent*, dimana masing masing pihak berusaha untuk memaksimalkan kepentingan mereka. Untuk meminimumkan konflik tersebut, maka perlu dilakukan pengawasan. Prasetyantoko menyatakan **“dengan pengawasan yang baik, biaya yang terjadi akibat ketegangan hubungan antara pemilik modal (*principal*) dan pengelola (*agency*) dapat ditekan.”⁹**

Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan mekanisme *good corporate governance* (GCG). GCG sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan diharapkan dapat memberikan kepercayaan terhadap manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik, sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan meminimumkan biaya keagenan.

2.1.2 Stakeholder Theory

Motivasi perusahaan untuk mengungkapkan CSR didukung dengan adanya *stakeholder theory* yang mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh *stakeholder*-nya. Perusahaan berusaha mencari pembenaran

⁸ Rudi Isnanta, Skripsi **Pengaruh Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan**: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hal.8

⁹ Prasetyantoko, **Corporate Governance Pendekatan Institusional**, Edisi Pertama: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal.77

dari para *stakeholder* dalam menjalankan operasi perusahaan. Pemikiran yang melandasi CSR yang sering dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau *shareholder*) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas. CSR dari perusahaan terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua *stakeholder*, termasuk di dalamnya adalah pelanggan atau customer, pegawai, komunitas, pemilik, investor, pemerintah, *supplier*, bahkan juga kompetitor (Mullins, 2002 dalam Amaeshi dan Adi, 2006 dalam Kania, 2011).

Kasali dalam Iryanie (2009) dalam Kania (2011) membagi *stakeholder* menjadi:

1. *Stakeholder* Internal dan *stakeholder* eksternal

Stakeholder internal adalah *stakeholder* yang berada di dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (*shareholder*). Sedangkan *stakeholder* eksternal adalah *stakeholder* yang berada di luar lingkungan organisasi, seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok *social responsible investor*, *licensing partner* dan lain-lain.

2. *Stakeholder* primer, sekunder dan marjinal

Tidak semua elemen dalam *stakeholder* perlu diperhatikan. Perusahaan perlu menyusun skala prioritas. *Stakeholder* yang paling penting disebut *stakeholder* primer, *stakeholder* yang kurang penting disebut *stakeholder*

sekunder dan yang biasa diabaikan disebut *stakeholder* marjinal. Urutan prioritas ini berbeda bagi setiap perusahaan meskipun produk atau jasanya sama. Urutan ini juga bisa berubah dari waktu ke waktu.

3. *Stakeholder* tradisional dan *stakeholder* masa depan

Karyawan dan konsumen dapat disebut sebagai *stakeholder* tradisional, karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan *stakeholder* masa depan adalah *stakeholder* pada masa yang akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti dan konsumen potensial.

4. *Proponents, opponents, dan uncommitted*

Diantara *stakeholder* ada kelompok yang memihak organisasi (*proponents*), menentang organisasi (*opponents*) dan ada yang tidak peduli atau abai (*uncommitted*). Organisasi perlu mengenal *stakeholder* yang berbeda-beda ini agar dapat melihat permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proposional.

5. *Silent majority* dan *vokal minority*

Dilihat dari aktivitas *stakeholder* dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan pertentangan atau dukungannya secara aktif namun ada pula yang menyatakan secara pasif.

Terdapat beberapa alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*, yaitu:

1. Isu lingkungan melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka,

2. Dalam era globalisasi telah mendorong produk-produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan,
3. Para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk memilih perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program lingkungan,
4. LSM dan pencinta lingkungan makin aktif dalam mengkritik perusahaan-perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan.

2.2 *Corporate Social Responsibility*

2.2.1 *Pengertian Corporate Social Responsibility*

CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Matias dalam Lisanti menyatakan “***Corporate social responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan dimana merupakan wujud tanggungjawab dan sikap kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat.***”¹⁰

Sedangkan definisi CSR menurut *Organization For Economic Cooperation And Development* (OECD) mendefinisikan CSR Sebagai:

“ *Business’ contribution to sustainable development and that corporate behavior must not only ensure returns to shareholders,wages to employees,and*

¹⁰ Lisanti Puspa Ningrum, Skripsi **Pengaruh Faktor - Faktor Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 - 2013**: Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2015, hal. 1

products and service to consumers, but they must respond to societal and environmental concerns and value.”

Definisi diatas menjelaskan bahwa CSR sebagai kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan serta perilaku perusahaan (*corporate*) yang tidak hanya menjamin adanya return bagi pemegang saham, upah bagi para karyawan, produk serta jasa bagi para pelanggan, tetapi perusahaan juga harus memberikan perhatian terhadap berbagai hal yang dianggap penting dan nilai-nilai dalam masyarakat dan lingkungan. Menurut Matias dan Agus **“Niat tulus yang diwujudkan dengan implementasi program pemberdayaan masyarakat secara profesional adalah “spesies” yang saat ini diberi nama tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).”**¹¹

Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada kinerja perusahaan saja tetapi juga harus bertanggung jawab atas apa yang ditimbulkan oleh aktifitas operasional perusahaan. Dimana tanggung jawab sosial dapat didefinisikan sebagai kewajiban organisasi yang tidak hanya menyediakan barang dan jasa tetapi juga menjaga kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup maupun lingkungan sosial, serta adanya kontribusi positif yang diberikan terhadap komunitas/masyarakat dimana perusahaan itu berada.

¹¹ Matias dan Agus, **CSR Perspektif Pekerjaan Sosial**, Edisi Pertama: PT Grasindo Monoratama, Medan, 2012, hal.7

2.2.2 *Index CSR*

Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia adalah merujuk standar yang dikembangkan oleh GRI (*Global Reporting Initiatives*). Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Manajemen (IAI-KAM) atau sekarang yang dikenal dengan Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) merujuk standar yang dikembangkan oleh GRI dalam pemberian penghargaan Indonesia *Sustainability Report Awards* (ISRA) kepada perusahaan-perusahaan yang ikut serta dalam membuat laporan keberlanjutan. Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, dan pemanfaatan *sustainability report*.

GRI merupakan sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah memelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia. GRI berfokus pada tiga pengungkapan yang terdapat dalam lampiran, antara lain:

- a. Indikator kinerja ekonomi yang terdiri dari 9 item meliputi kinerja ekonomi, keberadaan pasar dan dampak ekonomi langsung.
- b. Indikator lingkungan yang terdiri dari 30 item meliputi material, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, limbah, produk dan jasa, kesesuaian, transport, dan aspek secara keseluruhan
- c. Indikator kinerja sosial yang terdiri dari 40 item meliputi

- 1) Indikator praktik tenaga kerja dan kinerja pekerja yang layak terdapat aspek ketenagakerjaan, hubungan tenaga kerja/manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja, pendidikan dan pelatihan, keanekaragaman dan kesempatan yang sama.
- 2) Indikator kinerja hak asasi manusia terdapat aspek praktik investasi dan pengadaan, aspek non-diskriminasi, kebebasan berserikat dan daya tawar kelompok, aspek tenaga kerja anak, pegawai tetap dan kontrak, praktek keselamatan, hak masyarakat (adat) dan aspek kemasyarakatan.
- 3) Indikator kinerja kemasyarakatan terdapat aspek kemasyarakatan, korupsi, kebijakan publik, perilaku anti pesaing dan aspek kesesuaian.
- 4) Indikator kinerja tanggung jawab dari dampak produk terdapat aspek keselamatan dan kesehatan konsumsi, komunikasi pemasaran, privasi konsumen dan aspek kesesuaian.

2.3 *Good Corporate Governance*

Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer.

Good Corporate Governance berkembang seiring dengan tuntutan publik yang menginginkan terwujudnya kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggungjawab. Tuntutan ini sebenarnya merupakan jawaban publik terhadap semakin maraknya kasus-kasus penyimpangan korporasi di seluruh dunia. Akuntabilitas telah menjadi salah satu item yang tercantum dalam dasar hukum atau aturan organisasi. Karena organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya.

Konsep *Good Corporate Governance* antara lain menegaskan bahwa dalam melakukan aktivitas ekonominya, perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban ekonomi dan hukum, tetapi segala aktivitas ekonominya harus pula didasarkan pada etika. Berdasarkan pemikiran tersebut maka sekarang ini berkembang konsep etika perusahaan yang juga sering dinamakan dengan etika bisnis. Konsep etika perusahaan oleh banyak pihak diperjuangkan sebagai suatu panduan perilaku bagi pelaku usaha. Menurut Matias dan Agus “**Gagasan perlunya penerapan *Good Corporate Governance* diilhami oleh kajian tentang dampak dari sepak terjang para pelaku usaha yang sesungguhnya muncul sebagai jawaban terhadap persaingan yang makin ketat dalam dunia usaha.**”¹²

Akibat dari persaingan yang makin ketat tersebut, tentu sangat berpeluang bagi terjadinya asas-asas etika umum atau kaidah-kaidah dasar moral. Dalam

¹² *Ibid*, hal. 50

upaya mencegah pelanggaran terhadap asas-asas etika umum atau kaidah-kaidah dasar moral tersebut, tentu diperlukan pengelolaan perusahaan yang baik.

Menurut Matias dan Agus terdapat lima prinsip pengelolaan perusahaan yang baik yang oleh para pelaku usaha dapat dijadikan sebagai acuan, yaitu :

1. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)

Prinsip ini menuntut keterbukaan atas informasi. Dalam kaitan ini, maka seluruh perusahaan dituntut memiliki kerelaan dan kemampuan, memberikan informasi yang lengkap, benar atau akurat dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan.

2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip ini menuntut perwujudan atas kejelasan berkenaan dengan fungsi, susunan, sistem dan tanggung jawab tiap-tiap bagian yang ada dalam suatu perusahaan. Melalui implementasi asas ini akan mampu diwujudkan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan kekuasaan serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan eksekutif perusahaan.

3. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip ini menegaskan bahwa perusahaan harus memiliki kepatuhan terhadap hukum atau peraturan undang-undang yang sah atau berlaku sah. Seperti kepatuhan atas hukum perpajakan, hukum yang berkenaan dengan hubungan antara pelaku-pelaku industri dan para pekerjanya, hukum berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, hukum yang berkenaan dengan perlindungan terhadap lingkungan, hukum yang

berkenaan dengan pemeliharaan hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara pelaku-pelaku usaha dan masyarakat dan lain-lain. Dengan demikian implementasi prinsip ini akan menyadarkan para pelaku usaha bahwa dalam tiap-tiap operasional perusahaannya, mereka bukan hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham atau pemiliok perusahaan, tetapi juga memiliki tanggungjawab kepada seluruh pemangku kepentingan.

4. Prinsip Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini menegaskan perlunya pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa adanya benturan-benturan kepentingan ataupun tekanan dan campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan berbagai hukum yang sah. Dengan demikian profesionalisasi pengelolaan perusahaan merupakan harga mati, dan berbagai variabel yang menghalanginya harus dihindarkan.

5. Prinsip Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip ini menuntut, bahwa dalam semua aktivitas ekonominya perusahaan harus menghormati nilai-nilai keadilan, kepatutan atau kewajaran dalam memenuhi hak setiap pemangku kepentingan dengan segala kepentingan masing-masing.”¹³

¹³ *Ibid*, hal. 53

Mekanisme CG juga dapat membawa beberapa manfaat, antara lain:

1. Mengurangi agency cost yang merupakan biaya yang harus ditanggung shareholder karena penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
2. Mengurangi biaya modal (cost of capital) sebagai dampak dari menurunnya tingkat bunga atas dana dan sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
3. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, CG adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai shareholder dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Mengingat GCG merupakan konsep tata pengelolaan perusahaan dengan sebaik-baiknya, tentu saja dalam pengelolaan tersebut terkait beberapa prinsip yang harus dipahami. Menurut Organization For Economic Co-operation and Development (OECD) berkaitan dengan GCG ini mencakup 4 bidang utama yaitu:

1. Hak para shareholder dan sekaligus perlindungannya.
2. Peran karyawan dan pihak-pihak stakeholder lainnya.

3. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparan sehubungan dengan struktur dan operasi perusahaan.
4. Tanggung jawab dewan komisaris maupun direksi terhadap perusahaan, *shareholder*, dan *stakeholder* lainnya.

2.3.1 Kepemilikan Saham Manajerial

Struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan. Struktur kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah, dan institusi swasta. Struktur kepemilikan terbagi dalam beberapa kategori. Secara spesifik kategori struktur kepemilikan meliputi kepemilikan oleh institusi domestik, institusi asing, pemerintah, karyawan dan individual domestik. Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruh di antara *shareholder* atas kegiatan operasional perusahaan. Salah satu karakteristik struktur kepemilikan adalah struktur kepemilikan yang terbagi dalam dua bentuk struktur kepemilikan: kepemilikan terkonsentrasi, dan kepemilikan menyebar.

Dalam mekanisme pelaksanaan GCG, kepemilikan manajerial digunakan sebagai suatu upaya untuk mengurangi konflik agensi atau konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Dengan kepemilikan manajerial, maka manajemen akan secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan. Menurut Waryanto **“semakin besar kepemilikan manajerial di dalam perusahaan maka semakin**

produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah.”¹⁴

Kepemilikan manajerial juga dapat diartikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk masing-masing periode pengamatan. *Agency problem* bisa dikurangi bila manajer mempunyai kepemilikan saham dalam perusahaan, semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka akan baik kinerja perusahaan. Kepemilikan saham yang besar dari segi ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Secara teoritis ketika kepemilikan manajerial rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya oportunistik manajemen akan meningkat. Kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen. Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik. Kepemilikan Manajerial dihitung dengan besarnya persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan.

2.3.2 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak

¹⁴ Waryanto, **Op.Cit** , hal. 52

semata-mata demi kepentingan perusahaan . Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga “*fairness*” serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan shareholder mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan shareholder minoritas, bahkan kepentingan para stakeholders lainnya sekaligus “*the interest of the whole company*”.

Keberadaan komisaris independen telah diatur BEI melalui peraturan BEI tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang listed di bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki shareholder minoritas. Dalam peraturan ini persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Beberapa kriteria lainnya tentang komisaris independen adalah sebagai berikut:

- a. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan *shareholder* mayoritas perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- b. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- c. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.

- d. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- e. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh shareholder minoritas yang bukan *shareholder* pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Anggota dewan komisaris diangkat melalui RUPS. Ini dapat ditemukan di negara-negara seperti Indonesia, Belanda, Denmark, Jerman dan Jepang. Di sini yang dimaksud afiliasi yaitu seperti berikut ini:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal.
- b. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama.
- d. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.
- f. Hubungan antara perusahaan dan *shareholder* utama

2.3.3 Kepemilikan Saham Terkonsentrasi

Struktur kepemilikan terkonsentrasi dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen, sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan

untuk meningkatkan efektifitas monitoring, karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasi yang dimiliki manajemen. Menurut Waryanto **“kepemilikan saham tekonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan lainnya.”**¹⁵ Negara-negara dengan rendahnya perlindungan terhadap investor seperti halnya Indonesia, shareholder merasa khawatir akan kemungkinan berbedanya pendapatan yang diperoleh dengan yang diekspektasikan. Akibatnya, mereka memperbesar persentase kepemilikan atas perusahaan sebagai salah satu cara untuk melindungi diri.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengungkapan CSR banyak dilakukan oleh para peneliti. Sebagian besar penelitian terfokus pada faktor faktor yang terkait dengan pengungkapan CSR oleh perusahaan. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Variabel	Objek Penelitian	Analisis Data	Hasil
1	Pengaruh Praktek <i>Good Corporate</i>	Kania Amanda Distha (2011)	Independen: Struktur kepemilikan	Perusahaan perbankan yang terdaftar di	Regresi berganda	Struktur kepemilikan, Komposisi dewan

¹⁵ *Ibid*, hal. 56

	<i>Governance</i> (GCG) Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Pada Perbankan Yang Terdaftar Di bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2007-2009		terkonsentra ,komposisi dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris Dependen: Pengungkapan CSR	BEI tahun 2007-2009		komisaris dan ukuran dewan komisaris secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR
2	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dalam Laporan Tahunan Perusahaan	Pipit Widiyas Tuti (2013)	Independen: Ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan ukuran dewan komisaris Dependen: Pengungkapan CSR	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008 -2012	Regresi Berganda	Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR sedangkan profitabilitas dan leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan CSR
3	Pengaruh Faktor - Faktor <i>Good Corporate</i>	Lisanti Puspa Ningrum (2015)	Independen: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun	Regresi berganda	Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran

	<i>Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 - 2013</i>		, kepemilikan asing, ukuran dewan komisaris independen, ukuran komite audit dan kepemilikan saham terkonsentrasi. Dependen: Pengungkapan CSR	2011-2013		dewan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR sedangkan kepemilikan asing, ukuran komite audit dan kepemilikan saham terkonsentrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR
4	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR D)	Sulis Rochayatun (2017)	Independen : kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan komite audit. Dependen: Corporate social responsibility	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2014	Regresi Berganda	Dewan komisaris, komite audit dan ukuran dewan komisaris independen mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap SCR D sedangkan kepemilikan terkonsentra

			ty disclosure (CSRD)			si berpengaruh negatif terhadap CSRD
--	--	--	----------------------	--	--	--------------------------------------

2.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang pengungkapan CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia dan mengetahui pengaruh praktek GCG terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia.

Dalam posisi sebagai bagian dari masyarakat, operasi perusahaan seringkali mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Eksistensinya dapat diterima sebagai anggota masyarakat, sebaliknya eksistensinyapun juga dapat terancam bila perusahaan tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut atau bahkan merugikan anggota komunitas tersebut.

Adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan (*ownership*) dan fungsi pengendalian (*control*) dalam hubungan keagenan sering menimbulkan masalah masalah keagenan (*agency problems*). Masalah-masalah keagenan tersebut timbul karena ada konflik atau perbedaan kepentingan antara principal (pemilik perusahaan atau pihak yang memberikan mandat) dan agent (manajer perusahaan atau pihak yang menerima mandat). Teori keagenan (*agency theory*) berusaha menjelaskan tentang penentuan kontrak yang paling efisien yang bisa membatasi konflik atau masalah keagenan.

Namun demikian, adanya kontrak yang efisien belum cukup untuk mengatasi masalah keagenan. Konsep CG timbul karena adanya keterbatasan dari teori keagenan dalam mengatasi masalah keagenan dan dapat dipandang sebagai kelanjutan dari teori keagenan. Manajemen yang menerapkan GCG akan lebih concern dalam mengungkapkan secara luas hasil kinerja perusahaan yang manajemennya dikategorikan *Bad Corporate Governance*. Hal ini dikarenakan adanya beberapa elemen dalam GCG yang akan memonitoring manajemen dalam menjalankan kegiatannya. Elemen-elemen tersebut diantaranya adalah struktur kepemilikan saham manajerial, ukuran dewan komisaris independen dan kepemilikan saham terkonsentrasi. Domash dalam Priantana dan Yustian menyatakan :**kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan, yang biasanya dinyatakan sebagai persentase saham perusahaan yang beredar yang dimiliki oleh orang dalam perusahaan yaitu manajer, komisaris dan direksi.**¹⁶

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu bentuk struktur kepemilikan yang dapat mengatasi masalah agensi yang menyebabkan terciptanya konsep GCG. Kepemilikan saham oleh manajemen akan menurunkan permasalahan agensi

¹⁶ Priantana dan Yustian, **Pengaruh Struktur *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**, Jurnal Akuntansi, Vol. 4. No. 1:65-78, 2011

karena semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen maka semakin kuat motivasi mereka untuk bekerja dalam meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini berarti konflik kepentingan akan dapat dikurangi, karena manajemen akan berusaha menyalurkan kepentingan dengan kepentingan perusahaan salah satunya dengan melakukan praktik dan pengungkapan CSR

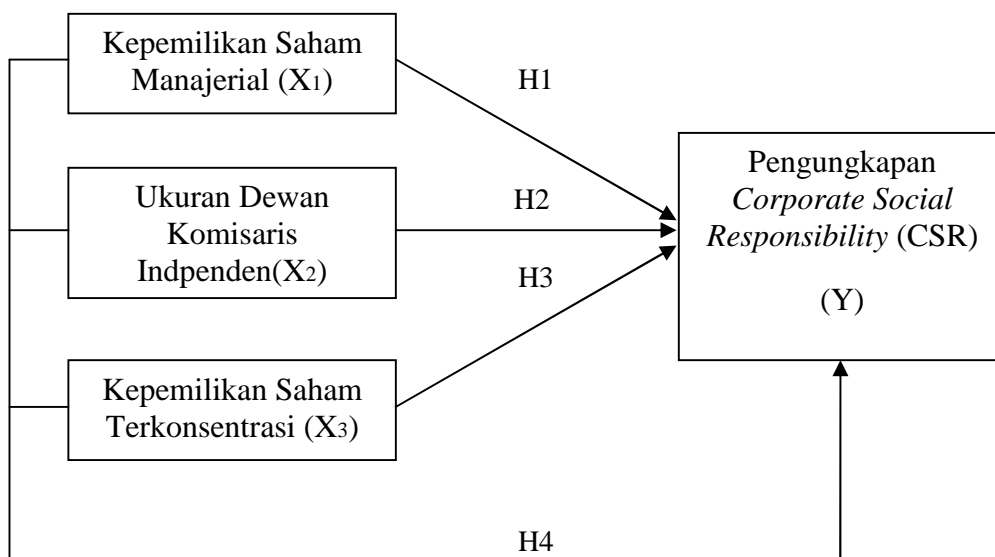
Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Dewan komisaris adalah wakil shareholder dalam perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan.

Struktur kepemilikan terkonsentrasi merupakan salah satu praktek GCG yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan yang dibuat. Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan lainnya.

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Dewan komisaris adalah wakil shareholder dalam perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk

menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan, Dewan komisaris independen dengan indikator komposisi dewan komisaris dan ukuran dewan komisaris sebagai elemen dari praktek GCG jika dikaitkan dengan pengungkapan CSR, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya.

Kerangka berfikir tersebut dapat digambarkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Hipotesis

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Kepemilikan Saham Manajerial dengan pengungkapan CSR

Dalam mekanisme GCG, kepemilikan manajerial digunakan sebagai suatu upaya untuk mengurangi konflik agensi atau konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Dengan kepemilikan manajerial, maka manajemen akan secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan. Menurut Waryanto **“Semakin besar kepemilikan manajerial di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah.”**¹⁷

Selain itu, dengan kepemilikan manajerial maka tindakan oportunitis manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi akan berkurang. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan yaitu dengan cara mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, meskipun manajer harus melakukan pengorbanan sumber dayanya untuk melakukan aktivitas tersebut.

Penelitian Yulia dan Melvie (2011) yang menunjukkan hasil signifikan positif dalam hubungan antara kepemilikan saham manajerial berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR. Konsisten dengan hal itu, penelitian Lisanti (2015) menemukan bahwa kepemilikan saham manajerial berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia. Berdasarkan asumsi tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

¹⁷ **Ibid**, hal. 52

H1= Kepemilikan saham manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR

2.6.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Independen dengan pengungkapan CSR

Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang terdaftar di BEJ harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas. Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Putu Ayu berpendapat **“secara spesifik proporsi komisaris independen yang semakin besar dinilai mampu menghasilkan proses pengawasan yang semakin berkualitas, sehingga seluruh strategi dan kebijakan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.”**¹⁸ Dewan Komisaris Independen menjadi faktor pada pengungkapan CSR. Keberadaan Dewan Komisaris Independen dengan wewenang yang dimiliki, diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat. Jadi, jika perusahaan mampu meningkatkan proporsi Dewan Komisaris Independen maka intensitas pengungkapan CSR juga akan semakin meningkat. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Ira dan Putu (2017) yang menunjukkan hasil signifikan positif antara

¹⁸ Putu ayu, **Karakteristik Good Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan Manufaktur**, Jurnal Akuntansi, 2011

dewan komisaris independen dengan pengungkapan CSR. Dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulis Rochayatun (2017) yang menunjukkan hasil signifikan positif antara dewan komisaris independen dengan pengungkapan CSR. Berdasarkan asumsi tersebut, maka peneliti mengajukan asumsi sebagai berikut:

H2= Ukuran dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR

2.6.3 Pengaruh Kepemilikan Saham Terkonsentrasi dengan pengungkapan CSR

Menurut Hasanuddin dalam Uut Ngesti **“perusahaan yang memiliki karakteristik kepemilikan terkonsentrasi akan menimbulkan dua kelompok pemegang saham, yaitu controlling shareholder dan minority shareholder.”**

¹⁹Dua kelompok pemegang saham tersebut dapat memicu masalah keagenan. Masalah keagenan yang sering terjadinya adalah adanya self dealing oleh controlling shareholder yang dapat merugikan minority shareholder di mana minority shareholder tidak diikutsertakan dan tidak bisa memberikan pendapat dalam pembuatan keputusan karena keputusan hanya dilakukan oleh controlling shareholder

Dengan kepemilikan terkonsentrasi, maka pemegang saham dapat mengimbangi informasi yang dimiliki oleh manajer, dengan kata lain proses monitoring dari pihak pemegang saham terhadap manajemen dapat berjalan

¹⁹ Uut Ngesti Pratiwi, Skripsi **Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Terkonsentrasi dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tingkat Likuiditas Saham di Indonesia**: Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2018, hal. 16

dengan baik dan tindakan oportunitis manajemen untuk menyembunyikan informasi akan berkurang. Dengan demikian dapat mendorong pengungkapan CSR untuk dilakukan dengan lebih luas. Pernyataan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan Waryanto (2010) yang menunjukkan hasil signifikan positif antara kepemilikan saham terkonsentrasi dengan luas pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3= Kepemilikan Saham Terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR

2.6.4 Pengaruh Kepemilikan Saham Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Saham Terkonsentrasi dengan pengungkapan CSR

Pengaruh mengenai ketiga hipotesis ini telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya dimana kepemilikan saham manajerial memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR karena semakin besar kepemilikan manajerial di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Ukuran dewan komisaris independen juga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR karena keberadaan dewan komisaris independen dengan wewenang yang dimiliki, diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat. Jadi, jika perusahaan mampu meningkatkan proporsi Dewan Komisaris Independen maka intensitas pengungkapan CSR juga akan semakin meningkat. Begitu juga dengan

kepemilikan saham terkonsentrasi yang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR karena dengan kepemilikan terkonsentrasi, maka pemegang saham dapat mengimbangi informasi yang dimiliki oleh manajer, dengan kata lain proses monitoring dari pihak pemegang saham terhadap manajemen dapat berjalan dengan baik dan tindakan oportunitis manajemen untuk menyembunyikan informasi akan berkurang. Dengan demikian dapat mendorong pengungkapan CSR untuk dilakukan dengan lebih luas. Berdasarkan asumsi tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H4= Kepemilikan Saham Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Saham Terkonsentrasi berpengaruh secara simultan dengan luas pengungkapan CSR

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah Laporan Tahunan perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian dimulai dari tahun 2016-2018 karena peneliti ingin mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* pada pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan manufaktur tersebut dengan data yang banyak untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengujian.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana dari struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin valid, objektif, efisien, dan efektif. Menurut Juliansyah Noor “**Desain penelitian harus dapat menerjemahkan model-model ilmiah kedalam operasional penelitian secara praktis²⁰.**”

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

²⁰ Juliansyah Noor, **Metodologi Penelitian**, Edisi Pertama : Kencana, Jakarta, 2011, hal. 107

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor Industri dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 yang di ambil dari website resmi PT. Bursa efek Indonesia yaitu, www.idx.co.id

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Menurut Juliansyah **“populasi dalam penelitian digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/ anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian.”**²¹

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2016-2018. Jumlah populasi adalah 58 perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI selama periode 2016-2018.

3.4.2 Sampel Penelitian

Menurut Juliansyah : **“Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih dari populasi.”**

²²Pengambilan sampel yang dilakukan adalah *purposive sampling* (Pemilihan sampel

²¹ **Ibid**, hal. 147

²² **Loc.Cit**

berdasarkan tujuan), yaitu pemilihan sampel secara tidak acak tetapi menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Kriteria yang ditentukan dalam hal pengambilan sampel dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

- 1) Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pada periode 2016-2018.
- 2) Perusahaan yang mengungkapkan CSR dalam laporan tahunan selama 2016-2018
- 3) Perusahaan yang memenuhi kriteria praktek GCG dalam laporan tahunan selama tahun 2016-2018
- 4) Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dan dapat diakses melalui website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)

Tabel 3.1
Sampel Penelitian

Kriteria sampel	Jumlah Perusahaan
Jumlah perusahaan sektor industri dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018	58
Perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR dalam laporan keuangan tahunan selama 2016-2018	(9)
	49
Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria GCG	(2)

Sampel rusak	47 (25)
Total sampel	22

Sumber : data sekunder yang diolah 2020

Jadi sampel yang diambil adalah 22 perusahaan dengan unit analisis 3 tahun x 22 perusahaan = 66

3.5 Variabel Penelitian

Menurut Juliansyah **“Variabel penelitian pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudia ditarik kesimpulannya.”**²³ Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Robbins dalam Juliansyah menyatakan **“Variabel Dependen merupakan faktor utama yang ingin dijelaskan atau diprediksi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain.”**²⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah pengungkapan CSR, sedangkan variabel independen menurut Robbins dalam Juliansyah adalah **“sebab yang diperkirakan dari beberapa perubahan dalam variabel terikat.”**²⁵ Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan saham manajerial, ukuran dewan komisaris independen dan kepemilikan saham terkonsentrasi . Definisi dari variabel dependen dan independen dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

²³ **Ibid**, hal. 48

²⁴ **Ibid**, hal. 49

²⁵ **Ibid**, hal. 48

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah CSR. Pengukuran yang biasa dilakukan untuk mengetahui kelengkapan informasi yang disajikan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya adalah dengan melakukan Checklist. Checklist merupakan kumpulan item pengungkapan yang diminta oleh suatu peraturan dan/atau standar (SAK) pengungkapan tersebut. Checklist disusun dalam bentuk daftar item pengungkapan, yang masing-masing item disediakan tempat jawaban mengenai status pengungkapannya pada laporan keuangan bersangkutan.

Adapun index pengungkapan dapat dirumuskan sebagai berikut Index Pengungkapan = Yes : (Yes+NO). Jumlah total pengungkapan CSR setiap perusahaan didapat dari penjumlahan item yang diungkapkan dengan item yang tidak diungkapkan. Pengukuran pengungkapan CSR tersebut dilakukan dengan menggunakan variabel dummy yaitu, dengan cara mengamati ada tidaknya suatu item informasi yang ditentukan dalam laporan tahunan, apabila item informasi tidak ada dalam laporan tahunan maka diberi skor 0, dan jika item informasi yang ditentukan ada dalam laporan tahunan maka diberi skor 1.

Pengungkapan sosial menunjukkan seberapa besar butir-butir pengungkapan yang disyaratkan telah diungkapkan. item-item pengungkapan terbagi dalam 4 tema pengungkapan: yang pertama tema kemasyarakatan terdapat 8 item, kedua tema produk dan konsumen terdapat 3 item, ketiga tema ketenagakerjaan terdapat 14 item, dan keempat tema lingkungan hidup terdapat 7 item. Indeks pengungkapan CSR (CSRI) pada perusahaan t dirumuskan sebagai berikut:

$CSRI = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Jumlah item yang disyaratkan}}$

3.5.2 Variabel Independen

3.5.2.1 Kepemilikan Saham Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham yang beredar. Kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

3.5.2.2 Ukuran Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$UDKI = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah komisaris}} \times 100\%$$

3.5.2.3 Kepemilikan Saham Terkonsentrasi

Struktur kepemilikan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi kepemilikan terkonsentrasi dan menyebar. Kepemilikan terkonsentrasi diproksi dengan jumlah

kepemilikan dalam suatu perusahaan tersebar >50% dimiliki oleh individu/keluarga. Sedangkan kepemilikan menyebar diproksi dengan jumlah kepemilikan saham individu/keluarga yang memiliki saham 50% dari total saham perusahaan. Setelah itu dibuat variabel dummy, yaitu 1 untuk Struktur kepemilikan terkonsentrasi, dan 0 untuk sebaliknya.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu variabel dependen (Pengungkapan CSR) dan variabel independen (kepemilikan saham manajerial, ukuran dewan komisaris independen dan kepemilikan saham terkonsentrasi). Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata (mean), maksimal, minimal, dan standar deviasi.

3.6.2 Analisis Inferensial

3.6.2.1 Uji Normalitas

Menurut Juliansyah **“uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.”**²⁶ Untuk mengetahui apakah variabel berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan grafik normal plot. Residual yang terdistribusi normal dapat diketahui dengan grafik normal tersebut bila titik-

²⁶ **Ibid**, hal.174

titiknya menyebar berhimpitan disekitar diagonal. Selain dengan menggunakan grafik uji yang digunakan untuk uji normalitas data dalam penelitian ini juga menggunakan uji statistik Kolmogorov-Siminov. Jika Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak menggunakan dua cara yaitu melalui analisis grafik dan analisis statistik.

3.6.2.2 Uji Asumsi Klasik

Secara teoritis model yang digunakan dalam penelitian ini akan menghasilkan nilai parameter model penduga yang sah bila memenuhi asumsi klasik, yaitu tidak terjadi multikolinieritas, heteroskedastis, dan autokorelasi.

1. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas terjadi jika ada hubungan linier yang sempurna atau hampir sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengkaji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mengkaji adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai tolerance serta variance inflation factor (VIF). Multikolinieritas terjadi jika nilai tolerance lebih tinggi dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%, dan nilai VIF lebih besar dari 10, apabila VIF kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model adalah dapat dipercaya dan objektif.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari suatu residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antar SRESID dan ZPRED dimana Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-studentized. Dasar analisisnya adalah:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) akan mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik penyebaran di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem korelasi. Artinya, bahwa kesalahan atau gangguan yang masuk ke dalam fungsi regresi adalah random atau tidak berkorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin Watson (DW).

3.6.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Di dalam model regresi, bukan hanya variabel independen saja yang memengaruhi variabel dependen, melainkan masih ada faktor lain yang dapat

menyebabkan kesalahan dalam observasi, yaitu yang disebut kesalahan pengganggu disturbance's error.

Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah struktur kepemilikan, komposisi dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan CSR. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$= \beta_0 X_1 + \beta_1 X_2 + \beta_2 X_3 + e$$

dimana:

- β_0 : indeks skor pengungkapan CSR
- β_1 : koefisien regresi
- X_1 : kepemilikan saham manajerial
- X_2 : ukuran dewan komisaris independen
- X_3 : kepemilikan saham terkonsentrasi
- e : error

3.6.2.4 Uji Hipotesis

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (t test)

Uji t merupakan bagian dari statistik parametrik, menurut Sahat Saragih **“statistik parametrik digunakan untuk data yang berdistribusi normal dan berskala interval atau rasio.”**²⁷ uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan

²⁷ Sahat Saragih, **Aplikasi SPSS Dalam Statistik Penelitian Pendidikan**, Edisi Pertama: Perdana Mulia Sarana, Medan, 2015, hal. 103

significance level 0,05 (=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji Signifikansi Simultan (F test)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (=5%). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

- a. Jika probabilitas signifikansi $> 0,05$ $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan ketiga variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika probabilitas signifikansi $< 0,05$ dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara simultan ketiga variabel independen tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur proporsi atau besarnya persentase variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi R^2 yang merupakan besaran nol negatif. Besarnya nilai R^2 adalah antara nol sampai dengan 1 ($0 \leq r^2 \leq 1$), hal ini dapat diartikan:

- a) Jika $R^2 = 0$, menunjukkan tidak adanya pengaruh variabel antar variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Jika R^2 mendekati 1, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- c) Jika R^2 semakin kecil dan mendekati nol, maka dapat dikatakan semakin kecil juga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.